

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
BANJIR AKIBAT PELUAPAN DANAU TEMPE KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**



OLEH

NURUL HIKMAH

NIM:2220203874235067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
BANJIR AKIBAT PELUAPAN DANAU TEMPE KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**



OLEH

NURUL HIKMAH

NIM:2220203874235067

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan
Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan
Marioriawa

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874235067

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare

Nomor: 2528 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing : Hasanuddin Hasim, M. H (.....)

NIP : 19901101 202012 1 017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874235067

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Nomor 2528 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 09 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hasanuddin Hasim, M.H

(Ketua)

Dr. Roswati Nurdin, M.H

(Anggota)

Rusdianto, M.H

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moral maupun material.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Sapri dan Ibunda Mulyati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak peretamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini.

Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Hasanuddin Hasim M.H selaku Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu membimbing, memberikan arahan serta saran-saran perbaikan. Terima kasih telah mempermudah

setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang peneliti hadapi. Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan. Penulis ucapkan terima kasih.

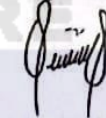
Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Hj.Darmawati,S.Ag,M.Pd selaku rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman,S.Ag.,M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian dalam menciptakan Pendidikan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa FAKSHI
3. Bapak Hasanuddin Hasim,M.H, Ketua Prodi Hukum Tatanegara selaku dosen pembimbing, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis menyelesaikan tugas ini dengan baik.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare
5. Seluruh staf pengajar di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di IAIN Parepare
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tatanegara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajaran yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait dengan kepengurusan selama studi di IAIN Parepare
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare

9. Kepada masyarakat Kecamatan Marioriawa yang telah bersedia memberikan informasi dan meluangkan waktunya dalam membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Nunu, Lisa, Virda, Adel, dan Hana yang selalu hadir dengan semangat, canda tawa, dan dukungan moral yang menguatkan disaat penulis merasa Lelah
11. Terima kasih kepada teman KKN Desa Padangloang, Putri, Deasy, Lisa, Rara, dan Ririn yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare
12. Terima kasih kepada Sudirman membangkitkan Kembali semangat penulis, memberikan dorongan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
13. Terima kasih untuk diriku sendiri, terima kasih karena tidak menyerah meski membagi Pundak antara tanggung jawab menyelesaikan studi dan kaki yang terus melangkah merintis mimpi. Terima kasih sudah tetap tegak berdiri meski tubuh sering merasa lelah.
14. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Soppeng, 20 Juni 2026

Penyusun,



Nurul Hikmah

NIM. 2220203874235067

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874235067

Tempat/Tgl Lahir : Batu-Batu, 23 Oktober 2001

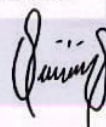
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir
Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Mariorawa
Kabupaten Soppeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Soppeng, 20 Juni 2026

Penulis,



Nurul Hikmah
Nim.2220203874235067

ABSTRAK

Nurul Hikmah, Efektivitas Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tanfidziyah (dibimbing oleh Bapak Hasanuddin Hasim).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang 1).strategi yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi banjir,2).efektivitas peran pemerintah dalam penanggulangan banjir,3).Peran pemerintah daerah perspektif siyasah tanfidziya Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi sosialisasi kebencanaan,melakukan pengerukan saluran air,membangun tanggul,pembersihan eceng gondok dan pengerukan sedimentasi danau.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara,dan dokumentasi. Informan penelitian yaitu, Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng dan Masyarakat Kecamatan Marioriawa. Selanjutnya data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).strategi yang digunakan pemerintah dalam mengatasi banjir yaitu sistem peringatan dini,pengerukan saluran air,membangun tanggul,pembersihan eceng gondok,pengerukan sedimentasi danau dan pembuatan pulau kecil. 2).efektivitas penanggulangan banjir dikatakan cukup efektif secara non fisik dengan memberikan bantuan logistik dan memberikan evakuasi namun belum efektif secara fisik karena pertumbuhan eceng gondok yang cepat dan sedimentasi danau yang cukup tinggi. 3).pemerintah telah melaksanakan amanah pemerintahan dengan melakukan upaya penanggulangan seperti penyampaian informasi, evakuasi,memberikan bantuan, pembersihan eceng gondok,pengerukan sedimentasi danau tempe. Pelaksanaan tugas tersebut mencerminkan prinsip siyasah tanfidziyah yang menekankan bahwa pemerintah wajib menjalankan amanah secara adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah dan Hadis Nabi yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanggulangan Banjir, Danau Tempe, Siyasah Tanfidziyah, Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Implementasi Hukum	15
2. Teori Efektivitas Hukum	17
3. Teori Siyasah Tanfiziyah.....	19
C. Kerangka Konseptual.....	10
D. Kerangka Pikir	31
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	33
E. Uji Keabsahan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
 BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 37
A. Hasil Penelitian	37 ...
1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng	
2. Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Air Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng	

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah	
B. Pembahasan.....	59
1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng	
2. Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng	
3. Peran Pemerintah Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah	
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GAMBAR

No gambar	Judul gambar	Halaman
1.	Bagian kerangka pikir	33
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat permohonan izin penelitian	Terlampir
Lampiran 2	Surat izin pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Soppeng	Terlampir
Lampiran 3	Validasi instrument penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Surat keterangan selesai meneliti	Terlampir
Lampiran 6	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 7	Biografi penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka i a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

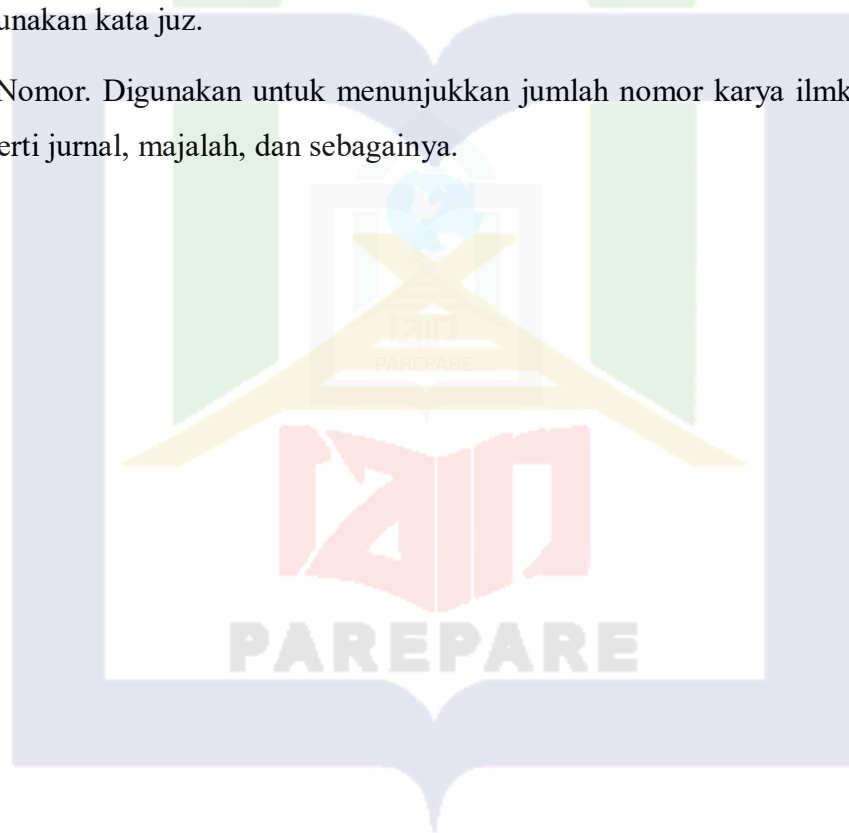
“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Salah satu wilayah yang rentan mengalami banjir adalah kawasan sekitar Danau Tempe, yang merupakan danau terbesar di wilayah Sulawesi Selatan dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Danau ini memiliki fungsi penting sebagai sumber perikanan, irigasi pertanian, serta penyangga ekosistem.

Namun, pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, kapasitas tampung danau sering kali tidak mampu menampung debit air yang masuk dari beberapa daerah aliran sungai sehingga menyebabkan peluapan air ke wilayah permukiman dan lahan pertanian. Salah satu daerah yang terdampak oleh peluapan Danau Tempe adalah Kecamatan Mariorawa. Banjir yang terjadi di wilayah ini berlangsung hampir setiap tahun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Peluapan air danau mengakibatkan terendamnya rumah penduduk, rusaknya infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam upaya mengurangi dampak banjir, pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Penanggulangan banjir dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai dan saluran air, penyediaan sistem peringatan dini, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun demikian, frekuensi dan dampak banjir yang masih terjadi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program-program tersebut. Penanggulangan banjir merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, yaitu sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Adapun tugas pemerintah dalam penanggulangan banjir meliputi:

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana banjir.
3. Menyusun perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.
4. Menyediakan pendanaan dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana antarinstansi pemerintah dan pihak terkait.
6. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana antarinstansi pemerintah dan pihak terkait.

Adapun fungsi pemerintah dalam penanggulangan banjir meliputi:

1. Fungsi mitigasi
Pemerintah berfungsi melakukan upaya pencegahan dan mengurangi resiko banjir melalui pembangunan tanggul, normalisasi sungai dan saluran air, dan pengelolaan daerah aliran sungai
2. Fungsi kesiapsiagaan
Pemerintah daerah berfungsi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan tim siaga bencana, pelatihan dan simulasi kebencanaan, dan penyediaan system peringatan dini banjir.
3. Fungsi rehabilitas dan rekontruksi banjir
Setelah banjir pemerintah akan melakukan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak, membantu pemulihan kondisi social dan ekonomi masyarakat, memperbaiki lingkungan yang berdampak banjir.

Pada tahun 2019 banjir terjadi dua kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2019 dan 3 Juli 2019, banjir pada 20 Juni tidak terlalu parah tetap bisa dilewati kendaraan tetapi area persawahan warga tergenang air dan banjir terjadi selama dua hari. Sementara itu, banjir yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2019 cukup parah karena tinggi air mencapai lutut orang dewasa sehingga kendaraan dua roda dan empat roda tidak bisa lewat, hal ini pasti mengganggu kegiatan ekonomi dan distribusi baran.

Banjir terparah pernah terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 di mana hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Soppeng terkena banjir. Saat itu ribuan rumah warga tergenang air dengan ketinggian antara 50 hingga 100 cm setinggi dada orang. Banjir tersebut juga merusak beberapa fasilitas seperti masjid, aspal jalan, dan bahkan beberapa mesin traktor petani yang terbawa arus air dan Jalan utama menuju Kabupaten Sidrap yang berada di Kecamatan Mariorawa tidak bisa dilalui oleh kendaraan apa pun. Bencana alam ini tidak memberikan manfaat apa pun bagi warga sekitar. Wilayah sekitar Danau Tempe digunakan sebagai lahan pertanian sehingga ketika banjir terjadi banyak sawah tergenang air dan mengakibatkan gagal panen. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang bekerja sebagai petani sehingga dapat dikategorikan sebagai kerentanan ekonomi.¹

Banjir tidak hanya merugikan para petani tetapi juga banyak merugikan para nelayan yang mengandalkan danau tempe sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Setiap hari nelayan mencari ikan di danau itu untuk dijual namun, ketika musim hujan tiba mereka kesulitan menangkap ikan karena air semakin tinggi sehingga menghanyutkan ikan dan merusak jaring mereka dan banjir juga menyebabkan kerusakan pada jalan. Tekanan air yang kuat membuat banyak rumah warga rusak karena tinggi air mencapai atas rumah-rumah penduduk. Kebanyakan rumah di sekitar danau tempe adalah rumah panggung bahkan tinggi air bisa melebihi atap

¹ Ananto Yudono, Afifah Harisah, Mochen Sir "Fleksibilitas Hunian Nelayan Berpanggung Terapung di Danau Tempe Kabupaten Soppeng" Jurnal Lingkungan Fakultas Teknik (2019).

rumah,selama banjir masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik seringkali padam.

Aktivitas sehari-hari masyarakat terutama anak-anak sekolah terganggu karena air masuk ke sekolah dan jalan menuju sekolah tidak bisa dilalui.Akses jalan yang menghubungkan dua kecamatan yang juga merupakan jalan utama kabupaten juga terganggu,banjir yang terjadi setiap tahunnya juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena air banjir yang kotor bisa menjadi sumber penyakit seperti diare,demam berdarah,dan infeksi kulit.Banjir yang parah memaksa masyarakat untuk pindah ke tempat atau daratan yang lebih tinggi dan membutuhkan bantuan logistik dari pemerintah serta lembaga sosial.

Banjir di Danau Tempe terjadi karena sedimentasi yang terus berlangsung di danau karena sedimentasi ini disebabkan oleh erosi yang terjadi akibat tumpukan sampah di danau dan pertumbuhan eceng gondok. Erosi terjadi karena pertanian di lahan kering terutama di daerah pegunungan serta penggunaan lahan yang sebelumnya merupakan hutan kini berubah menjadi pemukiman atau perumahan.Eceng gondok yang tumbuh di permukaan danau menjadi ancaman lingkungan jika eceng gondok terbawa angin atau arus air dan menabrak rumah warga bisa merusak bangunan terutama rumah kayu yang lebih rentan terhadap kerusakan akibat eceng gondok.Pada musim kemarau,eceng gondok yang mati dan kering menyebar ke seluruh permukaan danau menyebabkan pendangkalan ketika musim hujan tiba danau yang sudah terlalu dangkal tidak mampu menampung air sehingga terjadi luapan ke sekitar danau.²

Peluapan air dari danau tempe ini juga memengaruhi beberapa kelurahan di kecamatan Marioriawa seperti kelurahan Limpomajang,Kaca,Batu-Batu,dan Attang Salo.Beberapa lahan disekitar danau tempe digunakan sebagai lahan pertanian dan

² Mukti Ali,Sri Aliyah Ekawati,Arifuddin Akil”*Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo*”Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Jurnal Tepat(Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat),Vol.6 nomor 1 tahun 2023.

menjadi salah satu sumber pendapatan warga di kelurahan tersebut peluapan air danau tempe sering terjadi setiap satu tahun sekali dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, jika tidak ada upaya penanggulangan yang baik dari pemerintah setempat bencana banjir akan terus terjadi lagi.

Karena banjir yang terjadi di Kabupaten Soppeng beberapa tahun terakhir, terutama di beberapa kelurahan yang terletak di sekitar Danau Tempe Kecamatan Mariorawa masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya peran Pemerintah Kabupaten dalam mengelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BPBD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bencana. Dasar hukum utama BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa BPBD bertanggung jawab kepada kepala daerah dan berperan dalam menangani bencana di wilayahnya. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana memberikan panduan mengenai tahapan penanggulangan bencana seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi/revitalisasi. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan proses penyelenggaraan atau pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertip dalam bernegara. Peraturan perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk tercapainya cita-cita dan tujuan Negara yaitu kesejahteraan masyarakat.³ Oleh karenanya, BPBD wajib segera bertindak dalam menangani peluapan air di Danau Tempe Kabupaten Soppeng informasi mengenai kebencanaan sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Informasi ini membantu mengurangi kerugian dan dampak bencana peta rawan bencana juga bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi di masa depan oleh instansi atau badan terkait.

³ Hasanuddin Hasim "Herarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem" Fakultas Syariah, Madani Legal Review, Vol.1.No.2 Desember 2017

Rehabilitasi atau pemulihan kondisi korban akibat dampak bencana serta anggaran dan belanja yang memadai dan siap digunakan seharusnya sudah menjadi jaminan bagi orang-orang yang terkena dampak bencana alam dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana diharapkan penanganan bencana bisa lebih baik lagi oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola penanggulangan bencana alam. Penanganan bencana alam dilakukan secara terorganisir baik sebelum bencana terjadi, saat bencana sedang berlangsung, maupun setelah bencana berlalu.

Dalam perspektif fiqhi siyasah, efektivitas penanggulangan banjir berkaitan dengan siyasah tanfidziyah. Secara harfiah siyasah tanfidziyah berarti kebijakan pelaksanaan atau kebijakan eksekutif dalam konteks pemerintahan islam, siyasah tanfidziyah merujuk pada kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengelolaan negara, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, siyasah tanfidziyah juga bertindak sebagai alat pemerintah dalam mengatur pelaksanaan kebijakan, seperti penanggulangan bencana, termasuk banjir. Dengan kata lain siyasah tanfidziyah merupakan kebijakan dan strategi yang nyata dan diambil untuk mengatasi masalah yang terjadi di kalangan masyarakat.⁴

Penanggulangan banjir adalah salah satu masalah yang harus diatasi oleh pemerintah sebagai bagian dari tugasnya menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat diantaranya:

1. Kewenangan pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan

Siyasah tanfidziyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan mengatur sumber daya, mengambil kebijakan, dan mengambil tindakan operasional dalam penanggulangan banjir.

⁴ Nadira Lisyah "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Siyasah Tandfiziyah", [2025]

2. Penggunaan sumber daya dan anggaran yang tepat

Siyasah tanfidziyah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan.

3. Pelibatan dan perlindungan masyarakat

Siyasah tanfidziyah mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penanggulangan bencana, pemerintah bertanggung jawab menjaga hak-hak warga agar tidak menjadi korban banjir.

Berdasarkan pengamatan penulis banjir yang masih terjadi disebabkan oleh peluapan air danau tempe yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar di kabupaten Soppeng baik secara lingkungan, ekonomi, maupun sosial kerugian tersebut akan terus terjadi jika pemerintah daerah tidak melakukan penanganan atau upaya yang lebih baik hal ini terbukti dari terjadinya banjir setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menangani bencana. Untuk itu upaya penanggulangan bencana perlu dimulai dengan adanya peraturan dan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatasi bencana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi yang dibuat pemerintah daerah dalam menghadapi bencana harus disesuaikan dengan situasi setempat. Upaya penanggulangan bencana secara nasional harus berjalan dengan baik, cepat, dan bisa terus dilakukan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang baik, meliputi kebijakan, strategi, dan tindakan operasional, pemerintah pusat dan daerah perlu memulai dengan mengetahui sejauh mana peraturan terkait penanggulangan bencana sudah dijalankan di daerah.

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian guna mengangkat permasalahan yang ada di daerah tersebut, dan dicarikan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **"Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tanfiziyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategis yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mencegah peluapan danau tempe di Kecamatan Marioriawa?
2. Bagaimana efektivitas penanggulangan banjir akibat peluapan danau tempe di kecamatan Marioriawa ?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam perspektif Siyasah Tanfidziya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategis yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam mencegah peluapan danau tempe di Kecamatan Marioriawa
2. Untuk efektivitas penanggulangan banjir akibat peluapan danau tempe di Kecamatan Marioriawa
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan air dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Sebagai pemenuhan tugas akhir dalam perkuliahan serta menyediakan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian serupa dimasa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan danau yang ada di wilayah Indonesia
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, memberikan masukan terhadap pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan terkait penanggulangan peluapan air danau tempe di Kabupaten Soppeng

- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam mengantisipasi peluapan air danau tempe dimasa mendatang
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi masalah peluapan air danau tempe yang ada di Kabupaten Soppeng
3. Manfaat Empiris
- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan peran pemerintah dalam penanggulangan banjir akibat peluapan air danau tempe
 - b. Dapat menunjukkan berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan banjir di masa mendatang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Algafari dengan judul "Strategi Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Akibat Luapan Danau Tempe" mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan seringkali tidak mempertimbangkan aspek mitigasi banjir. Hal ini menyebabkan dampak banjir tetap terjadi karena dalam praktiknya penanggulangan banjir hanya dilakukan secara reaktif yang justru membuat permasalahan banjir terus berulang terutama di daerah yang rawan terkena banjir. Penelitian ini menyusun strategi mitigasi banjir yang efektif di Kecamatan Tempe penulis juga menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam menerapkan strategi mitigasi secara efektif. Selain itu, dianjurkan adanya kebijakan yang berfokus pada pengelolaan wilayah secara berkelanjutan guna mengurangi risiko banjir di masa depan.⁵

Penelitian Algafari dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas banjir yang terjadi karena luapan air danau tempe serta dampak yang ditimbulkan, seperti kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Perbedaan adalah penelitian Algafari fokus pada strategi mitigasi banjir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo akibat luapan danau tempe sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas upaya penanggulangan banjir akibat peluapan air danau tempe di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng.

⁵ ALGAFARI” *Strategi Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Akibat Luapan Danau Tempe*” Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (2023)

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ali Akbar Al Shiddiqi dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Belitung” menjelaskan bahwa banjir sering terjadi di Kabupaten Belitung, terutama karena daerah tersebut berada di pesisir pantai. Saat hujan deras air mengalir deras dan terdapat sungai yang berada dekat pemukiman warga hal ini menyebabkan banjir terjadi dengan frekuensi tinggi namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih kurang efektif dalam menangani bencana karena jarak yang jauh dan jumlah pegawainya yang tidak memadai. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPBD dalam penanggulangan banjir terdiri dari faktor penghambat dan pendukung faktor penghambat meliputi kemampuan pegawai yang masih kurang optimal karena mereka tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang sesuai pekerjaan yang dijalankan juga menghambat kinerja karena pegawai baru di BPBD belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas penanggulangan bencana secara baik sementara itu, faktor pendukung antara lain adanya dukungan dari organisasi yang bisa meningkatkan semangat pegawai, serta motivasi dan pengalaman yang menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja kerja tim.

Penelitian Muhammad Ali Akbar Al Shiddiqi dan penelitian penulis sama-sama membahas kerugian yang timbul seperti kerugian ekonomi dan lingkungan serta tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi banjir. Perbedaannya adalah penelitian Muhammad Ali Akbar Al Shiddiqi fokus pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi banjir di Kabupaten Belitung, sementara penelitian penulis fokus pada efektivitas penanggulangan banjir akibat peluapan air Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.⁶

⁶ Muhammad Ali Akbar Al Shiddiqi, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Belitung*.

3. Penelitian yang ditulis oleh Adi Ismail dengan judul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Pati” dalam penelitian ini disebutkan bahwa banjir sering terjadi di Kabupaten Pati dan menyebabkan kerugian, baik berupa barang maupun kerugian tidak berwujud. Kabupaten Pati adalah daerah di Indonesia yang memiliki banyak wilayah rawan banjir menurut Indeks Risiko Bencana Kab/Kota yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020, Kabupaten Pati memiliki peringkat 33 untuk risiko bencana cuaca ekstrim dan peringkat 95 untuk risiko banjir dari total 394 kabupaten/kota di Indonesia. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan risiko bencana lainnya seperti gempa yang peringkatnya 174, tanah longsor peringkat 375, dan kekeringan peringkat 219 hal ini membuktikan bahwa ancaman bencana alam tertinggi dan paling rawan di Kabupaten Pati adalah banjir yang sering terjadi setiap tahun selama musim hujan. Dalam penanggulangan bencana banjir lembaga yang paling berperan dan memiliki tanggung jawab terbesar adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD Kabupaten Pati sendiri bertugas mengatasi bencana alam termasuk banjir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.⁷

Persamaan penelitian Adi Ismail dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama menelaah tugas dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani banjir serta kerugian yang ditimbulkan akibat banjir itu

⁷ Adi Ismail “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Pati” Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

sendiri. Adapun perbedaannya penelitian Adi Ismail berfokus pada Stregi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Pasca Banjir Di Kabupaten Pati, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat luapan Air Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Di Kabupaten Soppeng.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implimentasi Hukum

Implementasi hukum adalah proses mengubah aturan hukum atau kebijakan yang sudah dibuat pemerintah menjadi tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat proses ini tidak hanya bergantung pada adanya peraturan saja tetapi juga tergantung pada pelaku yang menjalankannya, sumber daya yang digunakan, dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Implementasi hukum juga merupakan tahapan untuk mewujudkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh legislatif atau lembaga pembuat kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangani mplementasi ini tidak hanya mengacu pada adanya undang-undang atau peraturan tetapi lebih pada pelaksanaan kebijakan, program, dan tindakan yang benar-benar dilakukan agar bisa mencapai efek hukum yang diharapkan.

Hukum tanpa implementasi yang efektif dapat menjadi hal yang sia-sia karena hukum berjalan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Oleh sebab itu,implementasi hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar dapat memberikan keadilan,kepastian hukum,dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun beberapa fungsi penting implementasi hukum antara lain:

- a. Menjamin kepastian hukum agar hukum yang ada dapat ditegakkan secara konsisten
- b. Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua pihak tanpa melihat status
- c. Mengatur prilaku masyarakat agar dapat hidup tertib dan sesuai norma hukum

- d. Mendukung tujuan hukum seperti perlindungan hak asasi manusia, pengendalian sosial, dan pembangunan nasional.

Implementasi hukum tidak selalu berjalan dengan mulus, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum, antara lain.

- a. Kualitas peraturan hukum
- b. Sumber daya pelaksanaan
- c. Sarana dan prasarana
- d. Dukungan sosial dan politik
- e. Budaya hukum masyarakat

Adapun teori implementasi hukum menurut salah satu pendapat ahli yaitu Edward C. Bandfiel mengatakan bahwa penerapan hukum adalah proses di mana kebijakan atau aturan hukum diterapkan oleh lembaga yang berwenang ke dalam tindakan nyata. Edward C. Bandfiel menekankan bahwa penerapan adalah bagian dari pembuatan kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut. Kegagalan dalam penerapan biasanya terjadi karena kurangnya kerja sama antar lembaga, sumber daya yang terbatas, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pihak yang membuat kebijakan dengan pihak yang akan melaksanakannya.⁸

Terdapat aspek penting yang mempengaruhi kebijakan yaitu:

1. Kejelasan tujuan kebijakan
 - a. Mengurangi risiko banjir akibat peluapan Danau Tempe.
 - b. Melindungi masyarakat dan harta benda.
 - c. Meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi.
 - d. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
2. Kemampuan organisasi pelaksana yang meliputi:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana

⁸ Ahmad Fauzan " Model Implementasi Kebijakan Publik " Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17929-17938 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

- b. Pemerintah Kecamatan Marioriawa
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan
 - d. Intansi Teknik terkait
3. Koordinasi antar pelaksana

Dalam penanggulangan banjir, koordinasi diperlukan antara pemerintah daerah, BPBD, aparat desa, relawan, dan masyarakat agar tindakan mitigasi, evakuasi, serta penanganan darurat dapat berjalan efektif.

4. Ketersediaan sumber daya
- a. Dana
 - b. Personel
 - c. Peralatan
 - d. Teknologi
 - e. Informasi
5. Dukungan dan partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan banjir menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program penanggulangan banjir.⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep penting dalam ilmu hukum dan kebijakan publik yang menunjukkan sejauh mana aturan hukum yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam praktik sosial. Efektivitas hukum menjadi ukuran keberhasilan sistem hukum, kebijakan, dan regulasi yang diterapkan untuk mengatasi, mencegah, dan memitigasi dampak bencana tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

⁹ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati” *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*” Universitas Negeri Padang, Indonesia Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 83-88

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbicara tentang efektivitas berasal dari kata efektif yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas (operasi kegiatan atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Hands Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum dibicarakan pula tentang validitas hukum. validitas hukum berarti norma hukum itu mengikat setiap orang harus berbuat sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar upaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencamtumkan sanksi, sanksi tersebut bisa berupa positif maupun negatif.¹⁰

3. Teori Siyasah Tanfidziyah

Secara harfiah Siyasah Tanfdziyah berasal dari bahasa arab yaitu siyasah berarti politik atau tata kelola dan tanfidziyah berarti pelaksanaan atau eksekusi.

¹⁰ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhari (Sitta) Labuhan Batu, Vol. VI Edisi 1 Januari hlm 57

Siyasah Tanfidziyah ialah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum (perundang-undangan)atau juga bisa dikatakan pelaksanaan suatu kebijakan,peraturan,serta keputusan yang telah dibuat dan disepakati oleh sistem pemerintahan dan merujuk pada aspek pelaksanaan dari kebijakan negara yang bersumber dari hukum syariah dan aturan negara.¹¹ Dalam konteks manajemen dan kebijakan publik siyasah tanfidziyah mengacu pada program kebijakan atau tindakan yang sudah direncanakan dapat dijalankan dan diimplementasikan secara efektif dilapangan. Siyasah Tanfidziyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi

Muhammad Saw. Fiqhi Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintah Indonesia karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

Menurut Imam al-Mawardi, pemerintahan dibentuk untuk menjaga agama (hifz al-dīn) dan mengatur urusan dunia (siyāsāt al-dunyā). Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui pelaksanaan kekuasaan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana yang memastikan seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin memperoleh amanah untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan prinsip syariat, sehingga setiap tindakan pemerintah harus diarahkan pada perlindungan jiwa, harta, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi bencana seperti banjir, pemerintah wajib melakukan tindakan nyata berupa pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, serta pemulihan kondisi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah menurut Al Mawardi:

¹¹ Fatimah Azzahra, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah Di Permukiman Berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry (2023)hlm.37

1. Amanah dalam kepemimpinan
2. Mewujudkan kemaslahatan
3. Menolak kemudharatan
4. Keadilan
5. Pelayanan kepada masyarakat

Adapun komponen utama yang menjadi acuan dalam siyasah tanfidziyah:

- a. Perencanaan yang merupakan langkah awal yang menentukan bagaimana kebijakan atau program yang akan dijalankan
- b. Organisasi dimana dalam hal ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait yang berperan dalam pengelolaan atas program yang akan dijalankan
- c. Pelaksanaan yaitu implementasi kegiatan sesuai dengan program yang telah dibuat.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan program atau kebijakan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuannya tercapai.¹²Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan kebijakan dilapangan mulai dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan maupun pengawasan.

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan target yang diinginkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun dari segi waktu

¹² Sela Nur Regina, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Berdasarkan Siyasah Tanfidziyah Dan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2023) hal.17

penyelesaian. Efektivitas juga merujuk pada kemampuan suatu usaha, proses, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Secara luas efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam mengubah sumber daya menjadi hasil yang bermanfaat, tanpa pemborosan yang berlebihan, dalam konteks kehidupan sehari-hari efektivitas terlihat ketika seseorang atau kelompok mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat¹³.

Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, tetapi keduanya berbeda. Efisiensi lebih menekankan pada penghematan sumber daya dengan melakukan hal yang benar dengan cara berhemat, sementara efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang benar dengan melakukan hal yang tepat. Sebuah kegiatan dikatakan efektif jika tujuan tercapai sepenuhnya, meskipun mendekati sepenuhnya dan memerlukan sumber daya lebih banyak dari pada yang direncanakan.

Untuk mengukur efektivitas suatu program memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda tergantung pada siapa yang menilai dan juga menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan cara membuat perbandingan yang telah ditentukan oleh hasil yang telah tercapai. Adapun ukuran pencapaian efektif atau tidak pencapaian dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran yang terarah
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, melakukan berbagai upaya agar tidak salah jalan dalam melaksanakan suatu pencapaian tujuan
- c. Proses analisis, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional¹⁴.

¹³ Purwanti A "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya" Jakarta, 2022

¹⁴ Nurul Azzahra Femica "Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Non Formal Unarta" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2024), hal.11

- d. Perencanaan yang matang, memutuskan apa yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan melayani kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Keberadaan pemerintah sangat penting karena menjadi pelaksana kebijakan publik yang bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban, keamanan, kesejahteraan, serta perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara terminologis, peran pemerintah merupakan segala bentuk tindakan, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat seja nya menjadi acuan utama dalam menetapkan strategi kebijakan dalam rangka pembangunan daerah. Hakikat dari makna kesejahteraan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi beberapa dimensi kehidupan masyarakat.¹⁵ Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dituntut mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kebijakan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peran apabila

¹⁵ Rusdianto Sudirman, Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, (JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara, Volume 2 No. 2 April 2024)

telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah memiliki peran sebagai pelaksana amanat rakyat dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik (public service provider), fasilitator pembangunan, pelindung masyarakat, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai peran tersebut secara terpadu. Peran pemerintah semakin penting ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, maupun bencana alam lainnya.

Dalam kondisi demikian, pemerintah berkewajiban melakukan langkah-langkah pencegahan, mitigasi, penanggulangan, hingga pemulihan pascabencana agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan secara normal. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Seseorang atau lembaga dikatakan telah menjalankan perannya apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban menjalankan fungsi pemerintahan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pengawasan, evaluasi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Sri Heryati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana", Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik 2, no. 2 (2020): 139-146

Dalam penelitian ini, peran pemerintah diwujudkan melalui berbagai upaya penanggulangan banjir akibat peluapan air Danau Tempe di Kecamatan Marioriaawa. Fenomena banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan telah memberikan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai langkah penanggulangan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dalam penanggulangan banjir dapat dilihat dari beberapa fungsi utama.

- a. Sebagai regulator, yaitu pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, peraturan, dan program yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian banjir, penataan ruang, serta perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh instansi terkait dalam melaksanakan tugas penanggulangan banjir secara terpadu.
- b. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penanggulangan banjir, seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, penyediaan pompa air, pembangunan drainase, penyediaan tempat evakuasi, bantuan logistik, hingga penyediaan alat berat untuk membersihkan material pascabanjir. Pemerintah juga memfasilitasi koordinasi antarinstansi seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, dan masyarakat.
- c. Sebagai pelaksana pelayanan publik, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir melalui penyelamatan korban, distribusi bantuan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat pengungsian, serta pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana. Pelayanan yang cepat, tepat, dan merata menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran pemerintah.

- d. sebagai motivator dan pemberdaya masyarakat, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana, meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air, serta membangun budaya sadar bencana melalui sosialisasi dan pelatihan kebencanaan.¹⁷

Peran pemerintah menjadi sangat penting karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang paling sering terdampak peluapan air Danau Tempe. Banjir yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, tetapi juga sedimentasi Danau Tempe, pendangkalan sungai, kerusakan daerah resapan air, dan kurang optimalnya sistem drainase. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Soppeng melalui BPBD, Dinas PUPR, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa harus mampu menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan program penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

Efektivitas peran pemerintah dapat dinilai dari sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan mampu mengurangi risiko banjir, meminimalkan kerugian masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mempercepat proses penanganan ketika banjir terjadi. Semakin baik koordinasi antarinstansi, semakin tepat sasaran kebijakan yang diterapkan, dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin efektif pula peran pemerintah dalam penanggulangan banjir.

3. Penanggulangan Banjir

Penanggulangan bencana banjir merupakan serangkaian upaya, tindakan, dan strategi yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengurangi, mengendalikan, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh banjir terhadap manusia, lingkungan, dan sosial ekonomi. Tujuan utama dalam penanggulangan ini adalah untuk meminimalkan resiko kerugian

¹⁷Ayu Hapsari, Suswoto, dan Nita Ariyani, "Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana", *Journals of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021).

jiwa, kerusakan, serta gangguan aktivitas sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya banjir.

Banjir sendiri merupakan suatu kondisi dimana air meluap dan mengenangi wilayah yang biasanya kering, akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai dan jebolnya bendungan atau faktor lain seperti perubahan tata ruang lahan sehingga aliran air tidak terkendali. Pengelolaan bencana di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya penanggulangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional pada suatu negara. Upaya tersebut meliputi serangkaian tahapan, yaitu; upaya penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana atau yang dikenal dengan pra-bencana.

Upaya yang dilakukan ketika bencana terjadi ataupun setelah terjadinya bencana yang disebut pasca bencana. Pemerintah menjadi elemen dan stakeholder utama yang memiliki kuasa dan memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berkenaan dengan upaya mengurangi dampak bencana banjir yang dapat dilakukan adalah dengan persiapan menghadapi bencana mulai dari peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sampai pada persiapan pengelolaan pengungsi. Salah satu solusi terhadap permasalahan ancaman bencana alam banjir dapat melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana alam banjir.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana memiliki peran yang cukup penting, karena akan berpengaruh pada tindakan masyarakat ketika bencana terjadi¹⁸. Kesiapsiagaan sangat berkaitan dengan pengetahuan mengenai suatu bencana itu sendiri. Pengetahuan dan sikap menjadi indikator pertama untuk mengukur kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Pengetahuan terhadap

¹⁸ Uca, Rosmini Maru, “*Buku Mitigasi Bencana Pemetaan dan Zonasi Daerah Rawan Longsor dan Banjir*”, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Jl. Salemba Raya 28A Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2019

bencana merupakan alasan utama seseorang untuk melakukan kegiatan perlindungan atau upaya kesiapsiagaan yang ada. Adapun teori penanggulangan banjir menurut para ahli.

4. Peluapan air

Peluapan air merupakan fenomena dimana air meluap dari suatu wadah atau saluran akibat kapasitas penampungan yang tidak mampu menampung volume air yang masuk sehingga terjadi peluapan ke area sekitarnya. Dalam konteks hidrologi dan pengelolaan sumber daya air, peluapan air sering dikaitkan dengan kejadian banjir, drainase yang buruk, dan ketidakseimbangan antara curah hujan dan kapasitas saluran air. Secara hidrologis air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan mengalami infiltrasi, evaporasi, dan aliran permukaan. Ketika intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi dan saluran drainase, air akan mengalir secara berlebih dan menyebabkan peluapan. Selain itu, perubahan penggunaan lahan seperti urbanisasi yang mengakibatkan permukaan kedap air juga mempercepat aliran permukaan dan meningkatkan resiko peluapan¹⁹.

Permasalahan banjir menjadi bencana rutin di musim penghujan yang merebak diberbagai daerah aliran sungai di sebagian besar wilayah Indonesia. Jumlah kejadian banjir dalam musim hujan selama beberapa tahun terakhir terus meningkat begitu juga dengan jumlah korban manusia dan kerugian harta benda termasuk sarana dan prasarana. Selain masalah curah hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap hingga kepersawahan dan rumah warga sekitar yang berada di daerah aliran sungai. Adapun faktor-faktor terjadinya peluapan air sehingga menimbulkan resiko terjadinya banjir:

- a. Perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DSA)
- b. Kawasan pemukiman disekitar bantaran dam rusaknya hutan

¹⁹ Galang Mahardika Pratama, Liftiani Tsabitah Dewi”*Analisis Luapan Air Sebelum Pembangunan Pengendalian Banjir Dan Rob Sungai Loji Kota Pekalongan*”,Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Semarang (2023),hlm 1-2.

- c. Perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat
- d. Curah hujan yang sangat tinggi
- e. Kapasitas sungai
- f. Kapasitas drainase yang tidak memadai
- g. Pengaruh air pasang

5. Danau Tempe Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng

Kawasan danau tempe merupakan salah satu kawasan yang potensial di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar desa dikawasan Danau Tempe mengalami perkembangan yang lambat, pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidrap, Wajo dan Soppeng menunjukkan aspek asimilasi merupakan elemen yang paling menonjol diakomodasi. Danau tempe merupakan danau tertua dan terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, mengenangi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Wajo,Soppeng,dan Sidrap. Keberadaan Danau Tempe memberi pengaruh terhadap pola mata pencaharian dan pola permukiman di kawasan Salo Mate, Kelurahan Kaca Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng. Sebagian masyarakat nelayan hidup bermukim diatas permukiman air Danau Tempe dan menempati rumah terapung. Danau tempe juga merupakan danau alami yang berada di Pulau Sulawesi Selatan yang memiliki luas sekitar 14.406 hektar sehingga menjadikan danau tempe sebagai danau terbesar kedua di Pulau Sulawesi dan terbesar kedelapan di Indonesia.²⁰

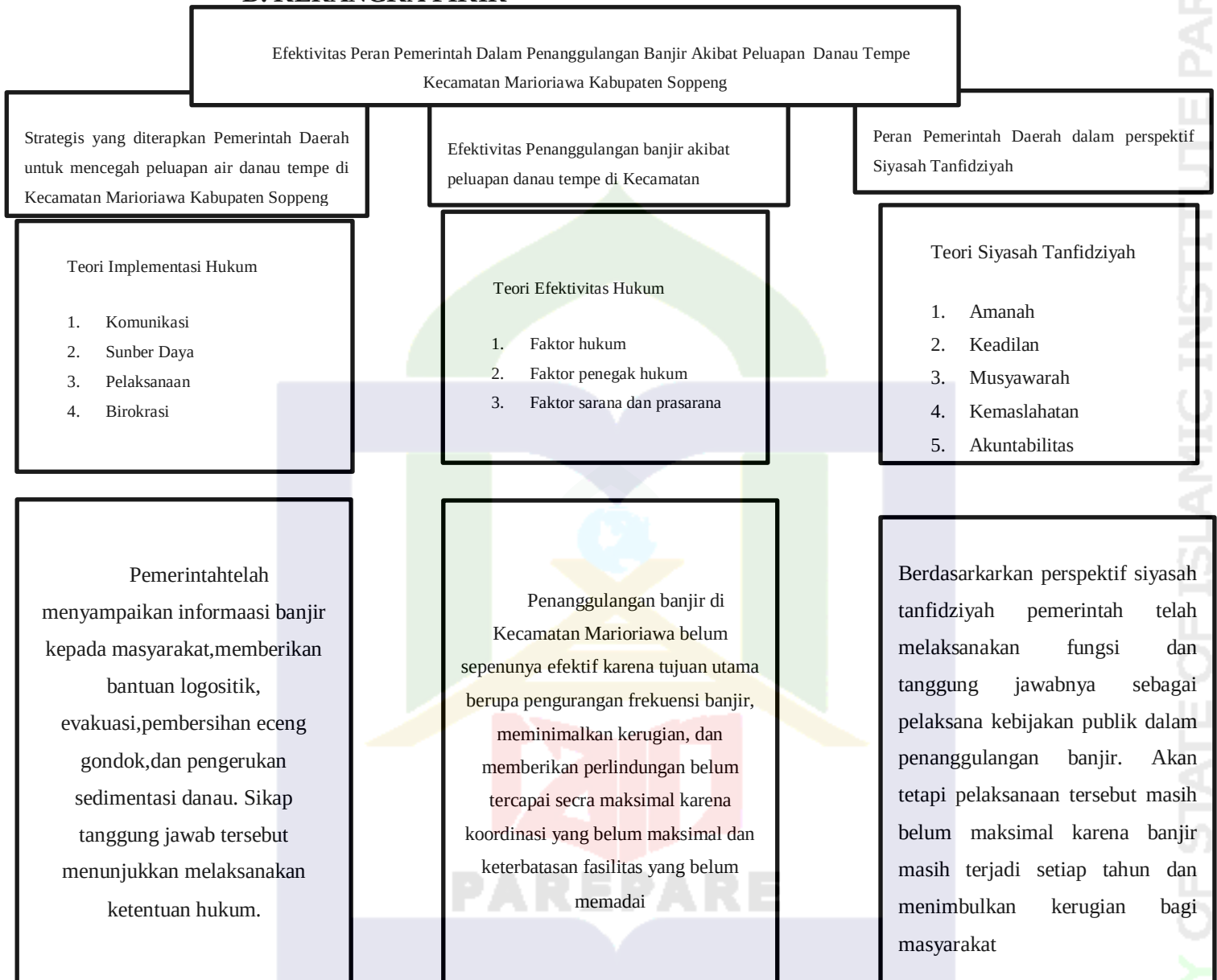
Danau tempe telah banyak dimanfaatkan guna memenuhi sumber air untuk kehidupan diantaranya oleh beberapa sektor pertanian,paristiwa,dan aktivitas masyarakat baik ekonomi maupun sehari-hari. Danau tempe adalah perairan yang memisahkan Pulau Sulawesi bagian selatan dan utara. Terdapat 23 sungai yang bermuara di Danau Tempe dan membuat kapasitas Danau Tempe menjadi sangat

²⁰ Agustin Purwanti,Roni Farfian,Chairun Nisa,Rifaldi Aji Sarifuddin,Aditya Wisnu M.P”Kajian Optimasi Kapasitas Danau Tempe untuk Mengurangi Banjir di Kabupaten Sidrap,Kabupaten Soppeng,dan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan”Jurnal Teknik Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik,Vol 21 No 01 2022

penuh. Tingginya intensitas hujan dengan durasi lama meningkatkan debit yang masuk bermuara, sehingga kapasitas danau terlampaui menyebabkan air meluap ke daerah sekitar danau. Meluapnya air danau tempe dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi terhadap manusia dan lingkungan sekitar danau.



D. KERANGKA PIKIR



Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penanggulangan banjir akibat peluapan danau tempe di Kecamatan Marioriawa telah terlaksana, namun efektivitasnya belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya banjir setiap tahun. Meskipun pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan upaya penyampaian informasi, bantuan logistik, evakuasi, pembersihan eceng gondok, dan pengerukan sedimentasi danau. Meskipun pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip siyash tanfidziyah tetapi efektivitas penanggulangan banjir masih perlu di tingkatkan melalui pelaksanaan koordinasi dan penyediaan fasilitas yang memadai dan pelaksanaan kebijakan yang lebih optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, artinya peneliti berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan deskriptif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini terletak Kelurahan Kaca, Madining, dan Lajarella di Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan dan jika memungkinkan waktunya ditambah akan ditambah sampai tertimpun data secara akurat.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber daya yang baik, penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal “Peran Badan Penanggulangan Bencana Dalam Mengatasi Banjir Akibat luapan Air Danau Tempe di Kabupaten Soppeng. Fokus penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bencana banjir yang dilakukan pemerintah dan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Soppeng.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat

dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, laporan, atau publikasi dari hasil wawancara.

1. Data Primer

Data yang diambil berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 44 Tahun 2023, BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan teori Edward C. Banfiel yang menenkan bahwa penerapan hukum merupakan proses dimana kebijakan hukum diterapkan oleh Lembaga yang berwenang

D. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan langsung dari lokasi penelitian. Agar memperoleh data-data yang akurat terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang selidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang dadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita penerapan penanggulangan bencana dalam mengatasi banjir akibat peluapan air danau tempe.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yang bermukiman disekitaran danau tempe.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dan peraturan-peraturan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

E. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi data yang menggabungkan berbagai macam teknik pengumpulan data asal atau sumber data yang telah ada. Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan mengajukan berbagai macam pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta memanfaatkan pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

2. Uji Transferability

Transferability dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Uji Dependability

Dependability dalam penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut.

4. Uji Konfability

Dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid dan akurat, mempertajam, memilih, menfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang akan dicapai. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti

secara berkelanjutan selama berada dilapangan. Dari awal pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai menganalisis benda-benda, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi.

G. Gambaran Umum Lokasi dan Kondisi Sosiologis Masyarakat Danau Tempe Kecamatan Marioriawa

Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Danau Tempe. Secara geografis, Danau Tempe adalah danau tektonik yang menerima pasokan air dari berbagai sungai besar di sekitarnya. Karakteristik ini menjadikannya sangat rentan terhadap fenomena pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi serta pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali.²¹

Bagi masyarakat Kecamatan Marioriawa, Danau Tempe tidak sekadar fenomena alam, melainkan urat nadi perekonomian, baik sebagai lahan perikanan darat maupun penopang irigasi pertanian. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, siklus tahunan luapan air danau telah berubah menjadi ancaman banjir yang destruktif bagi pemukiman, infrastruktur jalan, dan lahan pertanian warga. Kondisi sosiologis ini menempatkan masyarakat pada posisi dilematis: mereka bergantung pada danau untuk bertahan hidup, namun harus selalu bersiap menghadapi bencana banjir yang datang hampir setiap musim penghujan.

Kecamatan Marioriawa merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Soppeng yang secara geopolitik dan geografis memegang peranan krusial dalam konstelasi kawasan Danau Tempe. Secara topografis, wilayah Kecamatan Marioriawa yang berbatasan langsung dengan danau ini didominasi oleh dataran rendah dan dataran banjir (floodplain). Danau Tempe sendiri merupakan sebuah danau tektonik purba yang unik, yang berfungsi sebagai cekungan hidrologi raksasa (catchment area)

²¹Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, *Profil Danau Tempe*, (Makassar:BBWS Pompengan Jeneberang, 2023), hlm.1-5.

bagi tiga kabupaten utama di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

Secara hidrologis, Danau Tempe menerima pasokan air dari sistem jaringan sungai yang sangat kompleks. Sungai-sungai besar seperti Sungai Walanae dan Sungai Cenrana, bersama dengan puluhan anak sungai lainnya, bermuara dan melintasi sistem perairan ini. Karakteristik ekologis yang paling mencolok dari Danau Tempe adalah fluktuasi volume air yang sangat ekstrem antara musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau, danau ini menyusut drastis hingga membentuk daratan lumpur subur yang luas, sedangkan pada musim penghujan, wilayah ini bertransformasi menjadi lautan air tawar raksasa yang menenggelamkan area di sekitarnya.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, keseimbangan ekologis Danau Tempe berada dalam kondisi yang sangat kritis. Fenomena lingkungan yang paling mendasar adalah tingkat sedimentasi atau pendangkalan yang sangat masif. Erosi tanah yang terjadi di hulu sungai-sungai yang bermuara ke Danau Tempe membawa jutaan kubik lumpur setiap tahunnya. Akibatnya, dasar danau mengalami pendangkalan yang sangat cepat secara vertikal. Berdasarkan pengamatan sekunder dan pengakuan masyarakat lokal, kedalaman ideal danau telah berkurang secara signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi peluapan danau tempe kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng

a. Sosialisasi Kebencanaan

Sosialisasi merupakan pilar utama dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. BPBD kabupaten Soppeng tercatat telah melakukan upaya pengenalan resiko banjir kepada masyarakat di Kecamatan Marioriawa melalui kegiatan formal di tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara informan (Handayani) salah satu staf kantor BPBD kabupaten Soppeng dengan peneliti yang menyatakan :

”kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait edukasi Langkah penyelamatan diri”.²²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Soppeng telah menjalankan salah satu fungsi utama dalam manajemen bencana, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bencana serta tindakan yang harus dilakukan ketika banjir terjadi. Sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya mitigasi non-struktural karena bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi.

Melalui kegiatan tersebut masyarakat diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda potensi banjir, prosedur evakuasi, cara menyelamatkan diri, penyelamatan anggota keluarga yang rentan, hingga pentingnya menjaga dokumen penting dan menyiapkan perlengkapan darurat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Soppeng juga mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya

²² Handayani, Wawancara di kantor BPBD Kabupaten Soppeng, 27 Juni 2026

terhadap perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Dalam konteks Kecamatan Marioriawa, yang setiap tahun menghadapi banjir akibat luapan Danau Tempe, kegiatan sosialisasi memiliki peranan yang sangat strategis karena masyarakat hidup berdampingan dengan ancaman banjir yang bersifat berulang. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi menjadi langkah preventif yang dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BPBD tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana berlangsung, tetapi juga melaksanakan kegiatan sebelum bencana terjadi melalui pemberian informasi dan pendidikan kebencanaan. Hal ini sejalan dengan konsep penanggulangan bencana yang menempatkan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai tahapan penting dalam mengurangi dampak bencana. Masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri akan lebih mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika banjir datang sehingga tingkat kerentanan dapat diminimalkan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.²³

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan masyarakat, Ibu Rosmiati, yang menyatakan bahwa dirinya hanya pernah mengikuti sosialisasi sebanyak satu kali di kantor kelurahan dan setelah itu belum pernah lagi memperoleh informasi mengenai kegiatan serupa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa frekuensi sosialisasi masih relatif terbatas sehingga belum mampu memberikan pemahaman yang merata kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir.

²³ Rosmiati, Wawancara di Kelurahan Kaca 08 Juni 2026

Berdasarkan keterangan informan ibu Rosmiati (IRT, 50 tahun) beliau membernarkan kegiatan tersebut.²⁴

“kami pernah mengikuti sosialisasi dari BPBD sekitar satu kali di kantor kelurahan. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan cara menghadapi banjir dan Langkah penyelamatan diri tapi kegiatannya masih jarang dilakukan karena saya tidak pernah menerima informasi akan diadakan pertemuan tentang sosialisasi mengenai masalah banjir.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan menjelaskan bahwa strategi sosialisasi ini masih bersifat berjarak dan belum menjadi agenda rutin yang terprogram secara berkala setiap tahunnya. Akibatnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi struktural maupun non struktural hanya diingat saat materi diberikan. Jeda waktu yang cukup lama antar sosialisasi membuat kesiapsiagaan masyarakat tidak ter upgrade dengan baik, padahal karakteristik ancaman banjir danau tempa terus berubah setiap tahunnya akibat pendangkalan yang semakin parah.

Perbedaan informasi antara pihak BPBD dan masyarakat menunjukkan bahwa secara kelembagaan BPBD memang telah melaksanakan program sosialisasi, tetapi dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jangkauan peserta, kurangnya intensitas kegiatan, serta belum optimalnya penyebaran informasi mengenai jadwal sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, masih terdapat warga yang belum pernah mengikuti kegiatan edukasi kebencanaan ataupun memperoleh informasi secara berkelanjutan mengenai kesiapsiagaan menghadapi banjir. Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward C. Banfield, pelaksanaan sosialisasi oleh BPBD merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana.

Menurut Banfield, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan atau program yang telah direncanakan,

²⁴ Rosmiati, wawancara di Kelurahan Kaca 08 Juni 2026

²⁵ Romiati, Wawancara di Kelurahan Kaca, 08 Juni 2026

tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif hingga mencapai sasaran yang dituju. Dalam konteks penelitian ini, BPBD telah melaksanakan kebijakan melalui kegiatan sosialisasi sebagai bentuk implementasi program mitigasi bencana. Akan tetapi, efektivitas implementasi tersebut masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh masyarakat memperoleh manfaat secara merata. Dari perspektif efektivitas, pelaksanaan sosialisasi dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui jadwal kegiatan sosialisasi maupun prosedur kesiapsiagaan secara lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan sosialisasi sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Soppeng perlu meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi, memperluas cakupan peserta, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar informasi mengenai kegiatan kebencanaan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di daerah yang paling sering terdampak luapan Danau Tempe.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan Ibu Handayani menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Soppeng telah menjalankan perannya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kebencanaan. Akan tetapi, berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan peningkatan dari segi intensitas, pemerataan, dan keberlanjutan agar seluruh masyarakat Kecamatan Mariorawa memperoleh pengetahuan yang memadai dalam menghadapi banjir akibat luapan Danau Tempe. Dengan demikian, tujuan penanggulangan bencana untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dapat tercapai secara lebih efektif.

b. Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini merupakan elemen krusial dalam manajemen resiko bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian material maupun korban jiwa. Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, strategi peringatan dini terkait peluapan danau tempe masih bertumpu pada pola komunikasi tradisional yang mengandalkan koordinasi antara pemerintah tingkat kelurahan/desa dan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara informan (Handayani) yang menyatakan:

”informasi disampaikan kepada masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat segera melakukan Langkah antisipasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yaitu Ibu Handayani, diperoleh informasi bahwa penyampaian peringatan kepada masyarakat dilakukan melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar masyarakat segera mengambil langkah antisipasi ketika terdapat potensi luapan air Danau Tempe”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya membangun koordinasi antarinstansi dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Koordinasi tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana banjir. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem peringatan dini yang diterapkan masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebaran informasi kebencanaan. Informasi masih banyak mengandalkan komunikasi langsung dari aparat pemerintah kepada masyarakat, sehingga kecepatan penyampaian informasi sangat bergantung pada kondisi jaringan komunikasi di tingkat desa serta kesiapan aparat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam situasi tertentu, keterlambatan penyampaian informasi dapat mengurangi efektivitas upaya mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, belum semua masyarakat memperoleh informasi secara bersamaan.

Masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat pemerintahan desa terkadang menerima informasi lebih lambat dibandingkan masyarakat yang berada di pusat permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peringatan dini masih memerlukan penguatan agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.²⁶

Keberhasilan sistem peringatan dini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap informasi yang diberikan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa ketika pemerintah menyampaikan informasi mengenai kenaikan debit air Danau Tempe, masyarakat segera melakukan berbagai tindakan antisipasi seperti memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, mengevakuasi ternak, serta mempersiapkan tempat pengungsian apabila kondisi banjir semakin parah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward C. Banfield, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan fungsi implementasi melalui penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek penyebaran informasi yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dengan demikian, implementasi sistem peringatan dini masih memerlukan peningkatan agar tujuan perlindungan masyarakat dari risiko banjir dapat tercapai secara lebih

²⁶ Handayani, wawancara di kantor BPBD 27 juni 2026

efektif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Ibu Vira (IRT 30 tahun) yang menyatakan:

“Biasanya kami mendapat informasi dari pemerintah kelurahan kalau air danau mulai naik dan mengamankan barang penting dan biasanya juga informasi kenaikan atau peluapan air disampaikan di social media karena yang terjangkau banjir bukan cuman wilayah pesisir danau saja tetapi kelurahan terdekat juga terkena dampak peluapannya.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan informan menjelaskan bahwa Ketika debit air danau tempe mulai menunjukkan kenaikan di wilayah pemukiman warga, pemerintah kelurahan segera meneruskan informasi tersebut kepada warga khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir danau. Setelah air mulai naik warga meneruskan informasi kenaikan air melalui media sosial agar warga di kelurahan lain yang terkena dampak banjir segera waspada karena luapan air danau tempe bukan cuman berdampak di wilayah pesisir danau tetapi beberapa kelurahan yang ada dimarioriawa yang memiliki daratan dan sungai yang cukup rendah sehingga luapan danau tempe merambat di beberapa kelurahan tersebut.²⁸

c. Tindakan Fisik

Tindakan fisik pada tahap ini berfokus pada rekayasa infastruktur guna meminimalisir debit air yang meluap ke pemukiman warga dan lahan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Rosmiati (IRT 50 tahun) menyatakan:

“Pemerintah pernah melakukan pengerukan saluran air dan membangun tanggul, pembersihan eceng gondok, melakukan pengerukan sedimentasi danau, dan membuat pulau kecil dan juga pembersihan sungai-sungai yang airnya bermuara di danau tempe”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tindakan fisik yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi peluapan danau tempe meliputi:

²⁷ Vira, wawancara di Kelurahan Madining 08 Juni 2026

²⁸ Vira (IRT 30 tahun), wawancara di Madining 08 Juni 2026

1) Pengerukan saluran air

Pengerukan saluran air merupakan salah satu langkah teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mengurangi risiko banjir akibat peluapan Danau Tempe di Kecamatan Marioriaawa. Kegiatan ini dilakukan dengan mengangkat endapan sedimen, lumpur, pasir, dan material lainnya yang mengendap di dasar sungai maupun saluran drainase yang bermuara ke Danau Tempe. Pendangkalan yang terjadi selama bertahun-tahun menyebabkan kapasitas sungai menjadi berkurang sehingga aliran air tidak dapat mengalir secara optimal, terutama pada saat curah hujan tinggi.

Melalui pengerukan tersebut, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi saluran air agar mampu menampung debit air yang lebih besar dan memperlancar aliran air menuju danau maupun ke hilir sungai. Dengan meningkatnya kapasitas tampung saluran, potensi terjadinya luapan air ke kawasan permukiman masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu, pengerukan juga berfungsi mengurangi penyumbatan akibat tumbuhan air, sampah, dan sedimen yang selama ini menjadi salah satu penyebab melambatnya aliran air. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengerukan dilakukan secara berkala pada titik-titik yang dianggap mengalami pendangkalan paling parah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Soppeng agar kegiatan tersebut berjalan efektif.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengerukan belum sepenuhnya mampu mengatasi banjir karena sedimentasi kembali terjadi akibat tingginya erosi dari daerah hulu serta terbatasnya frekuensi pemeliharaan. Oleh karena itu, pengerukan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disertai upaya konservasi daerah tangkapan air agar hasilnya lebih optimal.

2) Membangun tanggul

Pembangunan tanggul dikawasan danau tempe termasuk strategis pengendalian banjir dan penataan Kawasan danau danau tempe memiliki

siklus tahunan dimana volume air meningkat drastis saat musim hujan yang seringkali memicu luapan air hingga kedaratan.²⁹ Keberadaan tanggul berfungsi sebagai pembatas dan pelindung utama agar luapan air danau tidak merendam arean pemukiman warga pesisir kecamatan Marioriawa. Pembangunan tanggul merupakan salah satu strategi struktural yang diterapkan pemerintah dalam pengendalian banjir akibat peluapan Danau Tempe.

Tanggul dibangun pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi, terutama di sepanjang tepian danau yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, lahan pertanian, serta fasilitas umum. Tujuan utama pembangunan tanggul adalah membatasi meluasnya genangan air ketika permukaan Danau Tempe mengalami peningkatan akibat curah hujan tinggi maupun kiriman air dari daerah hulu. Keberadaan tanggul memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat menahan tekanan air sehingga luapan tidak langsung memasuki kawasan permukiman masyarakat. Selain melindungi rumah penduduk, tanggul juga berfungsi menjaga lahan pertanian agar tidak mengalami kerusakan akibat terendam banjir dalam waktu yang lama. Dengan demikian, pembangunan tanggul tidak hanya berorientasi pada pengurangan risiko bencana, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

3) Pembersihan eceng gondok

Dengan melakukan pembersihan eceng gondok dapat melancarkan aliran air dan mengurangi luapan serta mengembalikan kapasitas tampung air danau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembersihan eceng gondok dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain BPBD Kabupaten

²⁹ Vira, wawancara 08 juni 2026

Soppeng, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat sekitar Danau Tempe.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka kembali jalur aliran air sehingga air dapat mengalir lebih lancar menuju saluran pembuangan dan mengurangi tekanan air yang menyebabkan luapan ke wilayah permukiman dan lahan pertanian.³⁰ Menurut hasil wawancara dengan informan, keberadaan eceng gondok menjadi salah satu penyebab utama meluasnya genangan banjir di Kecamatan Marioriawa. Ketika eceng gondok menumpuk di permukaan danau maupun di pintu-pintu air, aliran air menjadi terhambat sehingga volume air terus meningkat dan akhirnya meluap ke daratan. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa kegiatan pembersihan eceng gondok merupakan langkah yang sangat penting dalam mengurangi risiko banjir.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembersihan eceng gondok belum mampu memberikan hasil yang optimal karena pertumbuhan tanaman tersebut berlangsung sangat cepat. Setelah dilakukan pembersihan, dalam beberapa bulan eceng gondok kembali memenuhi sebagian permukaan danau sehingga pemerintah harus melakukan pembersihan secara berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan eceng gondok memerlukan strategi yang berkelanjutan, didukung oleh anggaran yang memadai, penggunaan alat berat yang cukup, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan danau.

4) Pengerukan sedimentasi danau dan pembuatan pulau kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengerukan sedimentasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi Danau Tempe sebagai daerah tampungan air alami. Dengan bertambahnya kedalaman danau, kapasitas penyimpanan air meningkat sehingga mampu menampung debit air dalam jumlah yang lebih besar sebelum akhirnya dialirkan ke hilir. Selain mengurangi risiko banjir,

³⁰ Vira, wawancara di kelurahan Madining 08 Juni 2026

pengerukan sedimentasi juga berfungsi memperbaiki kualitas ekosistem danau, meningkatkan kelancaran aktivitas perikanan, serta menjaga keberlanjutan fungsi Danau Tempe sebagai sumber penghidupan masyarakat. Material hasil pengerukan sedimentasi tidak dibuang begitu saja, melainkan dimanfaatkan untuk pembangunan pulau-pulau kecil di kawasan Danau Tempe.³¹

Berdasarkan hasil penelitian, pulau-pulau tersebut difungsikan sebagai ruang terbuka hijau, habitat vegetasi, serta kawasan konservasi yang mendukung keseimbangan lingkungan. Selain memberikan manfaat ekologis, keberadaan pulau kecil juga membantu mengurangi energi gelombang air dan memperbaiki tata kelola kawasan danau secara keseluruhan.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi Edward C. Banfield, kebijakan pemerintah mengenai pengerukan sedimentasi telah diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesinambungan program, koordinasi antarinstansi, ketersediaan anggaran, serta dukungan masyarakat. Tanpa adanya pelaksanaan yang konsisten, manfaat dari pengerukan sedimentasi hanya akan bersifat sementara karena sedimentasi akan kembali terjadi..³²

2. Efektivitas penanggulangan akibat peluapan danau tempe kecamatan marioriawa kabupaten soppeng

Untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah, indikator yang digunakan mengacu pada tingkat keberhasilan dalam menurunkan frekuensi bencana, meminimalisir kerugian, serta kecepatan respons saat darurat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Vira (IRT 30 tahun) menyatakan :

³¹ Vira, wawancara di Madining 08 Juni 2026

³² Rosmiati (IRT 50 tahun), wawancara di Kelurahan Kaca, 09 Juni 2026

“banjir masih terjadi hampir setiap tahun, terutama saat curah hujan tinggi saat banjir pemerintah daerah datang memberikan bantuan logistik dan mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir dan tidak dapat di tempati” Hal yang sama dikatakan informan Sari (IRT 30 tahun) menyatakan: “ bantuan logistik memang ada tetapi jumlahnya terkadang belum cukup untuk warga terdampak apalagi Ketika banjir terjadi durasi harinya bisa mencapai 3 hari untuk wilayah luar pesisir dan untuk wilayah pesisir bisa mencapai 1 minggu.³³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan (IRT 30 tahun) dapat disimpulkan bahwa banjir akibat peluapan danau tempe masih sering terjadi hampir setiap tahun, khususnya pada saat curah hujan tinggi. Informan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap hadir memberikan bantuan logistik serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang rumahnya terdampak banjir. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Ibu Vira (IRT, 30 tahun), diketahui bahwa banjir akibat peluapan Danau Tempe masih terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika curah hujan berada pada intensitas yang tinggi. Meskipun demikian, informan menjelaskan bahwa setiap kali banjir terjadi, pemerintah daerah melalui instansi terkait, khususnya BPBD Kabupaten Soppeng, hadir di lokasi untuk memberikan bantuan logistik serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang rumahnya terendam banjir dan tidak lagi layak dihuni.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana. Kehadiran pemerintah dalam memberikan bantuan logistik dan melakukan evakuasi merupakan indikator bahwa mekanisme tanggap darurat telah berjalan. Bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak serta

³³ Sari,wawancara di Lajarella 10 Juni 2026

mengurangi risiko yang lebih besar, seperti korban jiwa maupun memburuknya kondisi kesehatan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan evakuasi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, apabila dikaji lebih mendalam, hasil wawancara tersebut juga memperlihatkan bahwa banjir masih terus berulang hampir setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah masih lebih berorientasi pada penanganan ketika bencana telah terjadi (tanggap darurat), sedangkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko banjir belum mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh. Dengan kata lain, keberadaan bantuan logistik dan evakuasi memang memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi belum cukup untuk mengurangi frekuensi maupun dampak banjir secara signifikan.³⁴

Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan banjir di Kecamatan Marioriawa dapat dikatakan cukup efektif pada tahap tanggap darurat, karena pemerintah hadir memberikan bantuan logistik dan melakukan evakuasi kepada masyarakat terdampak. Akan tetapi, secara keseluruhan efektivitasnya belum maksimal, sebab tujuan utama penanggulangan bencana, yaitu mengurangi frekuensi banjir dan meminimalkan dampaknya secara berkelanjutan, belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut terlihat dari kenyataan bahwa banjir masih menjadi bencana yang terjadi hampir setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan melalui peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), normalisasi Danau Tempe, peningkatan sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana. Dengan langkah tersebut, efektivitas penanggulangan banjir tidak hanya tercermin dari keberhasilan saat

³⁴ Sari, wawancara di Lajarella 10 Juni 2026

tanggap darurat, tetapi juga dari keberhasilan pemerintah dalam mengurangi risiko banjir di masa yang akan datang.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Ibu Sari (IRT 30 tahun) menunjukkan bahwa pemerintah memang telah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir. Akan tetapi, menurut informan, jumlah bantuan yang diterima terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak, terutama apabila banjir berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Informan juga menjelaskan bahwa durasi banjir dapat mencapai sekitar tiga hari pada wilayah yang berada di luar pesisir Danau Tempe, sedangkan pada wilayah pesisir genangan air dapat bertahan hingga satu minggu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sari (IRT, 30 tahun), diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui instansi terkait telah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir akibat peluapan Danau Tempe. Bantuan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada saat terjadi bencana. Akan tetapi, menurut informan, jumlah bantuan yang diterima terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terdampak, terutama apabila banjir berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Informan juga menjelaskan bahwa lama genangan banjir berbeda pada setiap wilayah. Di daerah yang berada di luar pesisir Danau Tempe, banjir umumnya berlangsung sekitar tiga hari, sedangkan pada wilayah pesisir genangan air dapat bertahan hingga satu minggu. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya semakin meningkat sehingga bantuan yang tersedia sering kali belum mencukupi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi tanggap darurat melalui penyaluran bantuan logistik kepada

³⁵ Vira (IRT 30 tahun), wawancara di Madining, 10 Juni 2026

masyarakat terdampak. Kehadiran pemerintah pada saat bencana merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bantuan logistik menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi beban masyarakat selama menghadapi bencana, terutama bagi warga yang kehilangan akses terhadap sumber pangan, air bersih, maupun tempat tinggal sementara.

Namun demikian, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan penanggulangan banjir masih menghadapi berbagai kendala. Bantuan yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan korban bencana masih perlu ditingkatkan. Selain itu, lamanya durasi banjir, khususnya di wilayah pesisir Danau Tempe, mengakibatkan kebutuhan logistik terus bertambah sehingga memerlukan sistem distribusi yang lebih baik serta ketersediaan cadangan logistik yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh adanya bantuan, tetapi juga oleh kecukupan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat.³⁶ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ibu Handayani yang menyatakan:

"Kalau dikatakan sudah efektif secara keseluruhan, menurut saya belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui BPBD bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya, seperti penanganan darurat ketika banjir terjadi, evakuasi masyarakat, penyaluran bantuan logistik, pendirian posko, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Namun, banjir masih terjadi hampir setiap tahun karena dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, meluapnya Danau Tempe, pendangkalan danau, serta keterbatasan infrastruktur pengendalian banjir. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan banjir. Oleh karena itu,

³⁶ Sari, wawancara di Lajarellah 10 Juni 2026

efektivitas penanggulangan banjir masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek mitigasi, normalisasi Danau Tempe, peningkatan infrastruktur, dan edukasi kepada masyarakat agar dampak banjir dapat diminimalkan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Handayani selaku staf BPBD Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa penanggulangan banjir akibat peluapan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program, seperti evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, pendirian posko pengungsian, serta koordinasi lintas sektor, pelaksanaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kendala yang dimaksud antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, luasnya wilayah terdampak banjir, serta faktor alam berupa curah hujan tinggi dan sedimentasi Danau Tempe yang menyebabkan kapasitas tampung danau semakin berkurang. Kondisi tersebut mengakibatkan banjir masih terjadi secara berulang setiap tahun sehingga efektivitas penanggulangan banjir belum mencapai hasil yang optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam memberikan respons saat banjir terjadi, tetapi juga dari keberhasilan upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program mitigasi, normalisasi Danau Tempe, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat agar efektivitas penanggulangan banjir di Kecamatan Marioriawa dapat semakin meningkat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. , pelaksanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Marioriawa dapat dikategorikan cukup

³⁷ Handayani, wawancara di Kantor BPBD 27 Juni 2026

efektif pada tahap pelaksanaan tanggap darurat, tetapi belum efektif secara menyeluruh. Hal ini disebabkan masih adanya kendala pada faktor sarana dan prasarana, keterbatasan logistik, lamanya durasi banjir, serta belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas logistik, memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, memperbaiki sistem distribusi bantuan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengembangkan program mitigasi yang berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, efektivitas penanggulangan banjir tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam merespons bencana, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mengurangi frekuensi banjir, mempercepat pemulihan masyarakat, dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana di masa mendatang. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi tanggap darurat sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana. Namun demikian banjir masih tetap terjadi meskipun sudah dilakukan berbagai upaya penanggulangan.³⁸

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Peluapan Danau Tempe Perspektif Siyāsah Tanfidziyah

Secara etimologis Siyāsah Tanfidziyah berasal dari dua kata, yaitu: *السياسة* (as-siyāsah), yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat. *التنفيذية* (at-tanfidhiyyah), yang berarti pelaksanaan atau eksekutif. Dengan demikian, *السياسة التنفيذية* (As-Siyāsah At-Tanfidhiyyah) dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau Dengan demikian, *السياسة التنفيذية* (As-Siyāsah At-Tanfidhiyyah) dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan peraturan dan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

³⁸ Sari (IRT 30 tahun), wawancara di Lajarella, 10 Juni 2026

Dalam kajian Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang yang membahas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang, menjalankan administrasi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan negara dapat terlaksana secara efektif, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut perspektif Islam, kekuasaan eksekutif bukan sekadar menjalankan pemerintahan, melainkan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (masalah) serta menjauhkan masyarakat dari kemudharatan (mafsadah). Dalam konteks pemerintahan modern di Indonesia, konsep Siyasah Tanfiziyah dapat dikaitkan dengan lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).³⁹ Sebagai perangkat pemerintah daerah, BPBD memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPBD tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Pelaksanaan pemerintahan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada Surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

(Terjemahnya)

³⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Pasal 4-10.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat.⁴⁰

Tujuan utama Siyasah Tanfidziyah adalah menciptakan pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan yang efektif. Secara rinci tujuan tersebut meliputi:

- a. Melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.
- b. Menjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan publik secara optimal.
- d. Melindungi hak-hak masyarakat.
- e. Mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).
- f. Mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah).
- g. Menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan beberapa prinsip, yaitu:

1) Amanah (الأمانة)

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, amanah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah menunjukkan sikap amanah dengan hadir pada saat terjadi bencana banjir melalui pemberian bantuan logistik, pelaksanaan evakuasi, pendirian posko pengungsian, serta koordinasi dengan berbagai instansi

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS.An-Nisa (4) :58.

terkait.⁴¹ Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab melindungi keselamatan masyarakat.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami bencana merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanah sebagaimana diajarkan dalam konsep pemerintahan Islam, yaitu pemimpin berkewajiban menjaga jiwa, harta, dan kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, amanah tidak hanya diwujudkan melalui penanganan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang berkelanjutan. Fakta bahwa banjir masih terjadi hampir setiap tahun menunjukkan bahwa amanah pemerintah dalam aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih optimal.

2) Keadilan (العدل)

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah diberikan secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah berupaya menyalurkan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak banjir tanpa diskriminasi. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang diterima masyarakat terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh korban banjir, terutama di wilayah yang mengalami genangan lebih lama.

Kondisi tersebut bukan berarti pemerintah bersikap tidak adil, tetapi lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah logistik, anggaran, serta kondisi lapangan yang menyulitkan distribusi bantuan. Oleh karena itu, prinsip keadilan akan lebih optimal apabila pemerintah mampu meningkatkan

⁴¹ Roswati Nurdin, *Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an* (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui), Vol Lx No.1, Juni 2013

pemerataan distribusi bantuan sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing.⁴²

3) Musyawarah (المشورى)

Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyasa Tanfidziyah yang menghendaki agar setiap kebijakan dirumuskan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah melaksanakan koordinasi dengan BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, relawan, serta masyarakat dalam proses penanggulangan banjir. Musyawarah tersebut dilakukan untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui musyawarah, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat kerja sama dalam menghadapi bencana.

4) Kemaslahatan (المصلحة)

Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam setiap kebijakan pemerintahan menurut Siyasa Tanfidziyah. Seluruh kebijakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan logistik, evakuasi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan penyediaan tempat pengungsian telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut mampu mengurangi beban masyarakat selama menghadapi bencana serta membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

⁴²Melisa dkk, "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no 1 (Januari 2023):243-245

Namun demikian, manfaat tersebut masih bersifat sementara karena banjir tetap terjadi setiap tahun.⁴³

Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan belum sepenuhnya bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat program mitigasi bencana, normalisasi sungai, pengelolaan Danau Tempe, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta edukasi kepada masyarakat agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.⁴⁴ Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan banjir melalui koordinasi antarinstansi, penyaluran bantuan, serta pelayanan kepada masyarakat terdampak. Akuntabilitas juga terlihat dari adanya pelaporan kegiatan, pendataan korban banjir, penyaluran bantuan berdasarkan data masyarakat terdampak, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan, terutama terkait kecukupan bantuan logistik dan upaya pencegahan banjir agar bencana tidak terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, memperbaiki sistem

⁴³ Setiawan,B.”Koordinasi Antarinstansi dalam Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Perkotaan “Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik,vol.5,no.1(2020):hlm.22-55

⁴⁴ Andi Pangerang Moenta,Syafa’at Anugrah Pradana,Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah,(Depok:Rajawali Pers,2018),hlm.50.

distribusi bantuan, serta memperkuat evaluasi terhadap setiap program yang telah dilaksanakan sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat semakin baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Stategis Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam mengurangi dampak banjir akibat peluapan Danau Tempe merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Strategi tersebut meliputi upaya pencegahan sebelum banjir terjadi, penanganan ketika banjir berlangsung, serta pemulihan setelah banjir. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan keadaan darurat, tetapi juga berusaha melakukan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.⁴⁵

Strategi yang dilakukan pemerintah meliputi pengerukan sedimentasi Danau Tempe, pembersihan eceng gondok yang menghambat aliran air, pembangunan dan perbaikan tanggul, normalisasi saluran air, serta koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan instansi teknis lainnya. Upaya tersebut dilakukan karena pendangkalan danau yang disebabkan sedimentasi serta pertumbuhan eceng gondok merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya frekuensi banjir di Kecamatan Mariorawa. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan debit air secara berkala serta memberikan informasi kepada masyarakat ketika terjadi peningkatan curah hujan yang berpotensi menimbulkan banjir. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya

⁴⁵ Pemerintah Kabupaten Soppeng, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Soppeng Tahun 2021-2026*,(Soppeng:Sekretariat Daerah,2021).

menangani banjir ketika bencana terjadi, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan agar risiko banjir dapat diminimalkan. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi di lapangan dan keterangan masyarakat, upaya tersebut belum mampu memberikan hasil yang maksimal.⁴⁶

Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya banjir hampir setiap musim penghujan yang menyebabkan rumah warga terendam, lahan pertanian mengalami gagal panen, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, serta kerusakan terhadap infrastruktur desa. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi hukum, maka implementasi kebijakan pemerintah sebenarnya telah berjalan karena seluruh program yang dilaksanakan merupakan bentuk pelaksanaan dari aturan mengenai penanggulangan bencana. Menurut teori implementasi hukum, suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut mampu dilaksanakan secara efektif oleh aparat pemerintah dan menghasilkan perubahan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya melalui berbagai program penanggulangan banjir, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Belum optimalnya implementasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingginya sedimentasi Danau Tempe yang terus meningkat setiap tahun, pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat, tingginya curah hujan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, serta luasnya wilayah terdampak banjir. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemerintah yang telah dilakukan belum mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh.

Menurut analisis peneliti, strategi yang diterapkan pemerintah sebenarnya sudah berada pada arah yang tepat, tetapi pelaksanaannya masih bersifat jangka pendek. Pemerintah masih lebih banyak melakukan tindakan setelah terjadi banjir dibandingkan membangun sistem pengendalian banjir yang bersifat permanen.

⁴⁶ Sukamto,B.,Lestari, “ *Dampak Sedimentasi dan Gulma Eceng Gondok terhadap Kapasitas Tampung Danau Tempe* “. Jurnal Ilmu Lingkungan dan Geografis, (2022),hlm.15

Oleh karena itu diperlukan program jangka panjang seperti normalisasi Danau Tempe secara berkelanjutan, pembangunan kolam retensi, rehabilitasi daerah aliran sungai, penataan tata ruang kawasan danau, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar upaya pengendalian banjir dapat memberikan hasil yang lebih optimal.⁴⁷

2. Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa efektivitas penanggulangan banjir akibat peluapan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan berbagai program penanggulangan banjir, namun banjir masih terjadi hampir setiap tahun dan menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pemberian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, evakuasi korban banjir, pendistribusian kebutuhan pokok, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, serta pembersihan eceng gondok yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air. Program-program tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi, masyarakat masih merasakan bahwa banjir belum dapat dicegah secara maksimal karena setiap musim penghujan wilayah permukiman dan lahan pertanian kembali terendam air.⁴⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan banjir tidak hanya dapat diukur dari banyaknya program yang telah dilaksanakan, tetapi juga

⁴⁷ Sugiyono. Kebijakan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Dampak Sosialnya. Jakarta: Alfabeta, 2022

⁴⁸ Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin, Rifqi Ridho Phahlevy, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 2 (2026): hlm. 42

dari sejauh mana program tersebut mampu mengurangi frekuensi dan dampak banjir. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena kerugian masyarakat masih terus terjadi, baik kerugian ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dalam Siyasah Tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pemerintahan (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) meskipun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, pendangkalan Danau Tempe, serta faktor alam yang menyebabkan banjir terus berulang. Oleh karena itu, dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah perlu memperkuat upaya mitigasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperbaiki tata kelola lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, prinsip masalah (*kemaslahatan umum*) dan *hifz al-nafs* (*perlindungan jiwa*), sebagai tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas suatu kebijakan.

a. Faktor Hukum

Pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan penanggulangan bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta berbagai peraturan turunannya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah memiliki legitimasi dalam menjalankan berbagai program penanggulangan banjir.

b. Faktor aparat atau penegak hukum

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi pascabencana. Namun demikian, keterbatasan anggaran,

luasnya wilayah terdampak banjir, serta keterbatasan peralatan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

c. faktor sarana dan prasarana

Faktor ini merupakan salah satu penyebab utama belum optimalnya penanggulangan banjir. Infrastruktur pengendali banjir yang tersedia belum mampu menampung volume air yang sangat besar ketika curah hujan meningkat.⁴⁹ Selain itu, sedimentasi Danau Tempe yang terus bertambah menyebabkan kapasitas tampung danau semakin berkurang sehingga air lebih mudah meluap ke permukiman masyarakat.⁵⁰

d. Faktor masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mendukung program pemerintah melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran air serta mengikuti arahan pemerintah ketika terjadi banjir. Namun masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah ke saluran air dan membiarkan tumbuhan liar berkembang sehingga menghambat aliran air. Kondisi tersebut turut memengaruhi keberhasilan program penanggulangan banjir.

3. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa Dalam Pespektif Siyash Tanfidziyah

Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan banjir akibat peluapan Danau Tempe dapat dianalisis melalui perspektif Siyash Tanfidziyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah

⁴⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Jakarta.

⁵⁰ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Laporan Pengelolaan Danau Tempe Tahun 2022 (Makassa: BBWS Pompengan Jeneberang, 2022).

memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam.

Siyasah Tanfidziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam penanggulangan banjir tidak hanya diukur dari adanya kebijakan, tetapi juga dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, penyelenggaraan pemerintah tidak hanya dinilai dari keberhasilan pelaksanaan program tetapi juga dari sejauh mana pemerintah menjalankan amanah dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut dapat dilihat dari:

a. Landasan Al-Qur'an

Dasar normatif mengenai kewajiban menjalankan amanah dan menegakkan keadilan bagi masyarakat terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S.An-Nisa(4):58⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwa jabatan pemerintahan merupakan amanah dari Allah SWT. Amanah tersebut mengandung kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, termasuk dalam penanggulangan bencana banjir. Pemerintah tidak

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS.An-Nisa (4) :58.

diperbolehkan mengabaikan keselamatan masyarakat, sebab hal tersebut merupakan bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks penelitian ini, BPBD Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebencanaan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab agar masyarakat terdampak banjir memperoleh perlindungan secara maksimal.

b. Hadis Nabi Saw.

Rasulullah Saw.bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).⁵²

Hadis ini menjadi dasar bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Kepala daerah, BPBD, camat, maupun aparat desa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta koordinasi selama terjadi banjir. Hal tersebut mencerminkan implementasi tanggung jawab pemimpin sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW.

c. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1) Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kaidah ini merupakan prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah. Semua kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kepentingan masyarakat. Program BPBD Kabupaten Soppeng berupa evakuasi, distribusi bantuan, penyediaan posko pengungsian, serta koordinasi lintas sektor merupakan bentuk

⁵² Muhammad bin Ismail.Shahih Muslim,terj.Thahir Suparta dkk.(Jakarta:Pustaka Azzam,2019),Jilid 6,Hadis No.1829

implementasi kaidah tersebut karena bertujuan melindungi keselamatan masyarakat.

2) Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dalam penanggulangan banjir, pemerintah harus lebih mengutamakan upaya pencegahan daripada hanya memberikan bantuan setelah bencana terjadi. Normalisasi sungai, rehabilitasi lingkungan, pembangunan tanggul, pengelolaan DAS, dan sistem peringatan dini merupakan bentuk implementasi kaidah ini.

3) Kemudaratan harus dihilangkan.

Banjir merupakan bentuk kemudaratan yang harus diminimalkan melalui tindakan nyata pemerintah. Pelaksanaan evakuasi, bantuan logistik, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan rehabilitasi pascabencana merupakan bentuk penerapan kaidah ini.

4) Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Saat masyarakat mengalami kesulitan akibat banjir, pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa bantuan sosial, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian, bantuan pangan, dan pemulihan ekonomi.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan sebagian besar fungsi Siyasa Tanfidziyah melalui koordinasi lintas sektor, penanganan darurat, distribusi bantuan, serta pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir. Hal tersebut menunjukkan adanya implementasi amanah kepemimpinan sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 dan hadis tentang tanggung jawab pemimpin.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menjalankan berbagai program penanggulangan banjir melalui BPBD sebagai pelaksana teknis. Program tersebut meliputi kegiatan mitigasi, pemberian

⁵³ Zulhamdi, "Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)," Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol.10.No.2 (2021):235-252

bantuan kepada korban banjir, pembangunan tanggul, normalisasi saluran air, pengerukan sedimentasi, pembersihan eceng gondok, serta koordinasi dengan instansi terkait. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi eksekutif dalam konsep Siyasa Tanfidziyah. Jika dikaitkan dengan komponen utama Siyasa Tanfidziyah, maka pelaksanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Mariorawa dapat dianalisis sebagai berikut.

1) Aspek perencanaan (planning)

Pemerintah telah menyusun berbagai program penanggulangan banjir sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan dalam menghadapi ancaman banjir yang setiap tahun terjadi di wilayah Danau Tempe.

2) Aspek pengorganisasian (organizing)

Pemerintah melibatkan berbagai instansi seperti BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan banjir. Kerja sama tersebut merupakan bentuk koordinasi yang menjadi bagian penting dalam konsep Siyasa Tanfidziyah.⁵⁴

3) Aspek pelaksanaan (actuating)

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan melalui tindakan nyata di lapangan, seperti evakuasi masyarakat, penyaluran bantuan logistik, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, serta rehabilitasi pascabencana. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanah sebagai pelaksana kebijakan publik.

4) Aspek pengawasan (controlling)

Pemerintah melakukan pemantauan kondisi cuaca, tinggi muka air, serta evaluasi terhadap program penanggulangan banjir yang telah dilaksanakan.

⁵⁴ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2020-2024, (Jakarta:BNPB,2020).

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, aspek pengawasan masih perlu ditingkatkan karena banjir masih terjadi secara berulang setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan masih perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Dalam perspektif Islam, tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan-tujuan syariat tersebut. Menurut analisis peneliti, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah melalui pelaksanaan berbagai program penanggulangan banjir. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut masih belum maksimal karena banjir masih terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Iqbal, Fiqhi Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya yang didasarkan pada teori sebelumnya yang sesuai dan berkaitan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir akibat peluapan air telah dilakukan melalui berbagai upaya, baik secara nonfisik maupun fisik. Upaya nonfisik meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penyampaian informasi melalui sistem peringatan dini, koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, serta edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana. Sementara itu, upaya fisik dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan tanggul, pengerukan sedimentasi dan saluran air, pembersihan eceng gondok, serta normalisasi sungai yang bermuara ke Danau Tempe. Meskipun berbagai strategi tersebut telah dilaksanakan, pelaksanaannya masih cenderung bersifat jangka pendek sehingga belum mampu mengatasi akar permasalahan banjir secara menyeluruh.
2. Efektivitas penanggulangan banjir akibat peluapan Danau Tempe di Kecamatan Mariorawa belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui BPBD telah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana, seperti evakuasi korban, pemberian bantuan logistik, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta rehabilitasi pascabencana. Namun demikian, banjir masih terjadi hampir setiap tahun dengan dampak yang cukup besar terhadap permukiman, lahan pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingginya sedimentasi Danau Tempe, pertumbuhan eceng gondok, tingginya curah hujan, keterbatasan anggaran, belum optimalnya infrastruktur pengendalian banjir, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana. Oleh karena itu,

efektivitas penanggulangan banjir masih perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Dalam perspektif Siyasaah Tanfidziyah, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah menjalankan fungsi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan publik dalam penanggulangan banjir sesuai dengan prinsip kemaslahatan (masalah). Hal tersebut terlihat dari adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap program penanggulangan banjir yang bertujuan melindungi jiwa, harta, dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip-prinsip Siyasaah Tanfidziyah belum terlaksana secara maksimal karena tujuan utama kebijakan, yaitu mengurangi frekuensi dan dampak banjir, belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan, memperluas keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana, serta melaksanakan program pengendalian banjir secara berkelanjutan agar kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasaah Idariyah, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng

Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan banjir melalui perencanaan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Upaya yang telah dilakukan, seperti pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, pembersihan eceng gondok, serta pemberian bantuan kepada masyarakat, perlu terus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sistem peringatan dini berbasis

teknologi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program penanggulangan banjir agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu mengurangi frekuensi dan dampak banjir di Kecamatan Marioriawa.

2. Bagi Masyarakat Kecamatan Marioriawa

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dengan menjaga kelestarian lingkungan Danau Tempe dan daerah aliran sungai. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran air, tidak membuang sampah ke sungai maupun danau, menjaga tanggul yang telah dibangun, serta mengikuti sosialisasi dan pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir dengan mematuhi informasi dan peringatan dini yang disampaikan oleh pemerintah sehingga risiko kerugian akibat banjir dapat diminimalkan.

3. Bagi Pemerintah dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik diharapkan semakin mengedepankan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program penanggulangan banjir. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga harus memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang berkelanjutan, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan pemerintahan dalam mewujudkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana prinsip maqāṣid al-syar'ah dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015, Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Jakarta, 2015.
- Ananto Yudono, Afifah Harisah, Mochén Sir”*Fleksibilitas Hunian Nelayan Berpanggung Terapung di Danau Tempe Kabupaten Soppeng*”Jurnal Lingkungan Fakultas Teknik (2019).
- Mukti Ali, Sri Aliyah Ekawati, Arifuddin Akil”*Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo*”Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Jurnal Tepat(Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat), Vol.6 nomor 1 tahun 2023.
- Hasanuddin Hasim”*Herarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*”Fakultas Syariah, Madani Legal Review, Vol.1.No.2 Desember 2017
- Nadira Lisyah”*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Siyasa Tandfiziyah*”, [2025]
- Muhammad Arrafi Tawakkal,”*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Dalam Menanggulangi Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007*”
- ALGAFARI” *Strategi Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Akibat Luapan Danau Tempe*” Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (2023)
- Muhammad Ali Akbar Al Shiddiqi”*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Belitung*”Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.
- Adi Ismail “*Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Pati*” Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
- Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhari (Sitta) Labuhan Batu, Vol.VI Edisi 1 Januari hlm 57
- Fatimah Azzahra, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah Di Permukiman Berdasarkan Perspektif Siyasa Tanfidziyah*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry (2023) hlm.37
- Sela Nur Regina, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Berdasarkan Siyasa Tanfidziyah Dan Qanun Kota*

- Rusdianto Sudirman, Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,(Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara, Volume 2 No. 2 April 2024)
- Purwanti A”*Teori Efektivitas:Definisi,Faktor,dan Aspek Pemicunya*” Jakarta, 2022
- Nurul Azzahra Femica”*Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Non Formal Uniarta*”Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2024),hal.11
- Uca,Rosmini Maru, “*Buku Mitigasi Bencana Pemetaan dan Zonasi Daerah Rawan Longsor dan Banjir*”, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Jl. Salemba Raya 28A Daerah khusus Ibukota Jakarta 2019
- Galang Mahardika Pratama, Liftiani Tsabitah Dewi”*Analisis Luapan Air Sebelum Pembangunan Pengendalian Banjir Dan Rob Sungai Loji Kota Pekalongan*”,Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Semarang (2023),hlm 1-2.
- Agustin Purwanti,Roni Farfian,Chairun Nisa,Rifaldi Aji Sarifuddin,Aditya Wisnu M.P”*Kajian Optimasi Kapasitas Danau Tempe untuk Mengurangi Banjir di Kabupaten Sidrap,Kabupaten Soppeng,dan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan*”Jurnal Teknik Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik,Vol 21 No 01 2022
- Banda Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Kota Banda Aceh*,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2023) hal.17
- Uca,Rosmini Maru,”*Buku Mitigasi Bencana Pemetaan dan Zonasi Daerah RawanLongsor dan Banjir*”, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Jl. Salemba Raya 28A Daerah khusus Ibukota Jakarta 2019
- Nur Annisa Alhadid.”*Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau*”.(Skripsi: UIN Suska Riau,2021).
- Lestari, Dian “ *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir* “,Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.9, No.2,2020
- ¹Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang,*Profil Danau Tempe*, (Makassar:BBWS Pompengan Jeneberang,2023), hlm.1-5.
- Badan Pusat Statistik *Kabupaten Soppeng,Kecamatan Marioriawa Dalam Angka 2025*, (Watangsoppeng:BPS Kabupaten Soppeng,2025), hlm.2-12.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Pasal 4-10.

Rosmiati, Wawancara di Kelurahan Kaca 08 Juni 2026

Vira, Wawancara di Madining 08 Juni 2026

Sari, wawancara 10 Juni 2026

Handayani, Wawancara 27 Juni 2026

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa (4) :58.

¹Melisa dkk, "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no 1 (Januari 2023):243-245

Setiawan, B. "Koordinasi Antarinstansi dalam Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Perkotaan " *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol.5, no.1 (2020):hlm.22-55

Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.50.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Soppeng Tahun 2021-2026*, (Soppeng: Sekretariat Daerah, 2021).

Sukanto, B., Lestari, " *Dampak Sedimentasi dan Gulma Eceng Gondok terhadap Kapasitas Tampung Danau Tempe* ". *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Geografis*, (2022), hlm.15

Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin, Rifqi Ridho Phahlevy, " *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*," *Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no.2 (2026): hlm.42

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, *Laporan Pengelolaan Danau Tempe Tahun 2022* (Makassa: BBWS Pompengan Jeneberang, 2022).

Sugiyono. *Kebijakan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Dampak Sosialnya*. Jakarta: Alfaberta, 2022

Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin, Rifqi Ridho Phahlevy, " *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*," *Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no.2 (2026): hlm.42

¹ Muhammad bin Ismail.Shahih Muslim,terj.Thahir Suparta dkk.(Jakarta:Pustaka Azzam,2019),Jilid 6,Hadis No.1829

Zulhamdi,"Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan),"Syarah:Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi,Vol.10.N0.2 (2021):235-252



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SRN CO0006085



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812 Telepon : (0484) 23743
Laman : <https://dpmtsp-nakertrans.soppeng.go.id> Pos-el: dpmtsp-nakertrans@soppeng.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 147/IP/DPMTNT/VI/2026

DASAR 1. Surat Permohonan **NURUL HIKMAH**
2. Rekomendasi dari **BADAN KESBANGPOL**

Tanggal 05-06-2026

Nomor 143/IP/REK-T.TEKNIS/KESBANGPOL/VI/2026

Tanggal 08-06-2026

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NURUL HIKMAH**UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE - PARE**
LEMBAGAJurusan : **HUKUM TATA NEGARA**ALAMAT : **TANETE, KEL. MANORANG SALO, KEC. MARIORIAWA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN BANJIR AKIBAT PELUAPAN DANAU
TEMPE KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIZIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN MARIORIAWA**JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**LAMA PENELITIAN : **08 Juni 2026 s.d 23 Juli 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran
sesuai ketentuan perundang-undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : **08 Juni 2026**

An. **BUPATI SOPPENG**
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos., M.M.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-961/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026

04 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL HIKMAH
Tempat/Tgl. Lahir : BATU-BATU, 23 Oktober 2001
NIM : 2220203874235067
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : TANETE, KEC. MARIO RIAWA, KABUPATEN SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFektivitas PENANGGULANGAN BANJIR AKIBAT PELUAPAN DANAU TEMPE KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.H.
NIP 197306272003121004



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA

Jl. H.A. Meru Nomor 71 Telp (0484) 2511340 Batu-Batu Kode Pos 90852
Laman: _____ Pos-el: _____

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 7.68/KMA/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syachrany Andi Nganro, SE, M.Si
NIP. : 19770501 200212 1 010
Pangkat / Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Camat Mariorawa
Unit Kerja : Kantor Camat Mariorawa

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hikmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Alamat : Tanete, Kel. Manorang Salo, Kec. Mariorawa

Adalah benar telah melakukan penelitian untuk mendapatkan data/informasi di Kecamatan Mariorawa dalam rangka penyusunan laporan penelitian yang berjudul "EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN BANJIR AKIBAT PELUAPAN DANAU TEMPE KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu-Batu, 12 Juni 2026

Camat Mariorawa,



Syachrany Andi Nganro, SE, M.Si
Pangkat Pembina, IV/a
NIP. 19770501 200212 1 010

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Vika*
Alamat : *Madung*
Umur : *30 Tahun*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudari Nurul Hikmah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tandfidziyah"

Demikianlah sebagai mana ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Soppeng, *08* Juni 2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

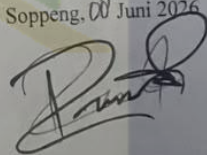
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosmali
Alamat : Kel. Kaca
Umur : 50 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudari Nurul Hikmah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tandfidziyah"

Demikianlah sebagai mana ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Soppeng, 08 Juni 2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

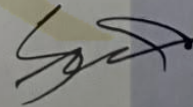
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sani
Alamat : Layanah
Umur : 30 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IR

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudari Nurul Hikmah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tandfidziyah"

Demikianlah sebagai mana ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Soppeng, 10 Juni 2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Vilpa*
Alamat : *Madnung*
Umur : *30 Tahun*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *IPT*

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudari Nurul Hikmah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penanggulangan Banjir Akibat Peluapan Danau Tempe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Perspektif Siyash Tandfidziyah"

Demikianlah sebagai mana ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Soppeng, 08 Juni 2026

Yang Bersangkutan

PAREPARE



PAREPARE

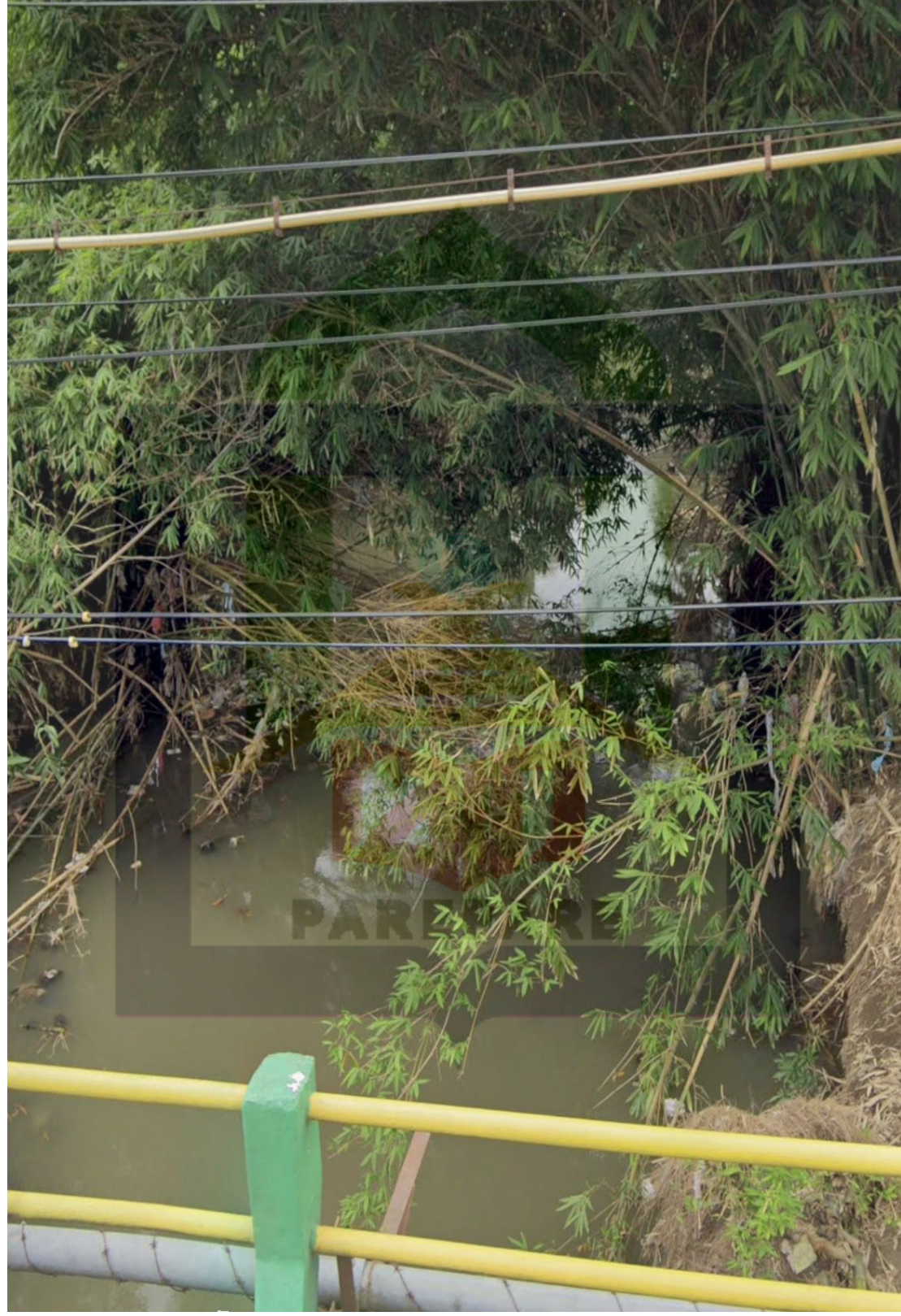












BIODATA PENULIS



Nurul Hikmah, lahir pada tanggal 23 Oktober 2001 Batu-Batu. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sapri dan Ibu Mulyati. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 50 Tarawang , Kabupaten Soppeng, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Yasrib Batu-Batu kemudian lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Soppeng (MAN 2), kemudian lulus di tahun 2020, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **EFEEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR AKIBAT PELUAPAN DANAU TEMPE DI KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**

Akhir kata, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kemudahan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

